

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Advokasi Perempuan Desa dalam Memperkuat Perlindungan bagi Pekerja Migran: Bermigrasi Aman Berkat Perdes dan Perda Perlindungan TKI

*Village Women's Advocacy for Strengthening Migrant Worker Protection:
Safe Migration under Village and District Regulations*

Penulis

Mustaghfiroh Rahayu dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka

Editor dan Pengulas Naskah

Volume Editors and Reviewers

Amalinda Savirani

Rachael Diprose

Annisa Sabrina Hartoto

Ken M. P. Setiawan

Penyunting dan Penerjemah Naskah

Copy Editors

Annisa Sabrina Hartoto

Bronwyn Beech Jones

Untuk merujuk studi kasus ini:

Rahayu, M., dan Abheseka, N.M.R., 2020. Advokasi Perempuan Desa dalam Memperkuat Perlindungan bagi Pekerja Migran: Bermigrasi Aman Berkat Perdes dan Perda Perlindungan TKI, [Village Women's Advocacy for Strengthening Migrant Worker Protection: Safe Migration under Village and District Regulations]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 165-188. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Kami menghaturkan terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) atas dukungan mereka, serta kepada para partisipan penelitian, terutama para perempuan desa yang telah membagikan pengalaman dan pandangan mereka dengan kami. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif dari semua studi kasus, lihat Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

To cite this case study:

Rahayu, M., and Abheseka, N.M.R., 2020. Advokasi Perempuan Desa dalam Memperkuat Perlindungan bagi Pekerja Migran: Bermigrasi Aman Berkat Perdes dan Perda Perlindungan TKI, [Village Women's Advocacy for Strengthening Migrant Worker Protection: Safe Migration under Village and District Regulations]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU: Jakarta, pp. 165-188. <https://doi.org/10.46580/124328>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

This research was supported by the Governments of Australia and Indonesia, and was conducted in consultation with the civil society organisations involved. We would like to thank these organisations and the Australia-Indonesia Partnership for Women's Empowerment and Gender Equality (MAMPU) for their support, as well as all participants in the research, in particular the countless village women who shared their experiences and views with us. The views expressed in the analysis are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the supporting governments or organisations. Future iterations of this case study might reflect further research and analysis over time. For a more extensive and comparative analysis of the case studies, see Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., and Francis, N., 2020. Women's Collective Action and the Village Law: How Women are Driving Change and Shaping Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, and MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124326>. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

Ucapan Terima Kasih

Tim editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam penelitian dan penulisan studi kasus mengenai aksi kolektif perempuan dan Dana Desa di Indonesia ini: Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niemi Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Volume studi kasus ini terwujud melalui kerja LSM-LSM yang terlibat yang berkomitmen penuh untuk mendukung dan membimbing perempuan di desa di seluruh Indonesia. Setiap hari para kader, staf, dan pendamping lapangan bergerak bahu membahu bersama perempuan desa untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan serta membentuk kebijakan, inisiatif, dan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan. Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi atas partisipasi mereka dalam workshop perencanaan dan analisis kolaboratif yang diselenggarakan dalam proses penelitian ini, dukungan yang diberikan selama penelitian di lapangan, beserta waktu yang mereka sediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan organisasi di level nasional: 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) serta mitra subnasional mereka — Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini dan Stewart Norup, yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga terkait penyusunan dokumen ini, dan juga kepada segenap tim MAMPU atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan diseminasi hasilnya, terutama Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjajanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada semua partisipan dalam penelitian ini, yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman semua perempuan yang berada di dalam bunga rampai ini kami harapkan dapat terus memberikan pelajaran dan inspirasi bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Ringkasan

Studi kasus ini menceritakan perubahan yang terjadi di desa penelitian di Lombok Tengah setelah keluarnya “Perdes Perlindungan TKI” pada tahun 2015. Perdes ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik perempuan dan lainnya, sejak awal keberangkatan, selama bekerja, hingga kembalinya ke tanah air. Akar dari semua masalah ini adalah minimnya informasi tentang migrasi aman dan bagaimana migrasi tanpa dokumen menempatkan perempuan dalam situasi penuh risiko. Karena tidak memiliki pengetahuan, para perempuan, terutama perempuan kepala keluarga yang harus menanggung sendiri penghidupan keluarganya, menjadi target utama para calo yang menawarkan pengurusan proses menjadi PMI dengan mudah. Para perempuan di desa ini kemudian menjadi PMI tanpa melalui prosedur dan bahkan dokumen yang legal, serta tanpa pemahaman menyeluruh tentang risiko bekerja di luar negeri. Akibatnya, ketika ada permasalahan selama bekerja, pemerintah kesulitan untuk memberikan bantuan diplomatik karena mereka tidak tercatat dalam sistem pemerintah.

Permasalahan di ataslah yang menjadi dasar bagi Migrant CARE dan mitra lokalnya, Perkumpulan Panca Karsa (PPK), untuk membantu masyarakat desa dalam membentuk DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) dan mendukung perempuan desa untuk menginisiasi berdirinya kelompok pemerhati pekerja migran “La Tansa” (dari bahasa Arab yang berarti “jangan lupa”), yang beranggotakan mantan pekerja migran dan keluarga mereka. Kelompok “La Tansa” ini membuka ruang bagi perempuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi, memperkuat jaringan mereka, membangun solidaritas pertemanan, serta menggalang dukungan dari sesama perempuan lain dalam mengadvokasi perlindungan PMI di desa studi di Lombok Tengah. Pembentukan DESBUMI diawali dengan PPK melakukan survei data mobilitas penduduk sebagai bahan untuk meyakinkan pemerintah desa akan pentingnya melakukan edukasi bagi PMI. Data tersebut, beserta dukungan dari pemerintah desa, memberikan jalan untuk pembentukan DESBUMI yang beranggotakan kader-kader perempuan yang bertugas mengedukasi tentang migrasi aman dan informasi layanan dokumen legal untuk calon pekerja migran.

Tidak lama setelah DESBUMI terbentuk, para perempuan yang pernah menjadi PMI dan keluarga mereka, mengorganisir diri dalam wadah Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa”. La Tansa adalah perpanjangan tangan dari DESBUMI. Anggotanya yang tersebar di berbagai dusun di desa penelitian menjadi sumber informasi bagi DESBUMI ketika ada permasalahan terkait pekerja migran. La Tansa memberikan informasi mengenai prosedur migrasi yang aman kepada masyarakat desa, dan sebagai hasilnya, banyak calon pekerja migran menjadi lebih memilih untuk mendapatkan izin dan dokumentasi melalui jalur resmi, daripada menggunakan calo. La Tansa juga bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan bagi perempuan mantan pekerja migran. Di La Tansa inilah para perempuan eks PMI mendapatkan pelatihan pembuatan kue basah dan kering juga kerajinan. Bahkan mereka juga mendapatkan bantuan alat-alat untuk produksi. Saat ini, keterampilan dari pelatihan tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan bagi para perempuan eks PMI. Bagi sebagian anggota, hasil dari pesanan dan penjualan kue dan keripik cukup untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka tidak perlu bekerja ke luar negeri.

DESBUMI dan Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa” memanfaatkan jaringannya dengan elit desa dan kabupaten untuk mendorong perubahan yang berkesinambungan. Tiga tahun setelah kerja-kerja DESBUMI berjalan, pemerintah desa mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri Asal Desa di Lombok Tengah. Dua tahun setelahnya, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lombok Tengah juga dikeluarkan, yang mengamanatkan layanan terpadu untuk kepengurusan dokumen pekerja migran yang legal. Perdes dan Perda ini dirumuskan dan ditetapkan melalui masukan dari perempuan desa dan atas dukungan PPK.

Perdes perlindungan pekerja migran ini membuat empat perubahan penting di desa. *Pertama*, adanya perubahan norma yang memungkinkan perempuan untuk berani berbicara, berkelompok dan memengaruhi kebijakan publik di desa. *Kedua*, meminimalisir masalah dan kekerasan yang dihadapi perempuan pekerja migran dengan memfasilitasi pengurusan dokumen secara legal di tingkat desa melalui DESBUMI. *Ketiga*, membantu pemerintah desa memiliki data migrasi penduduk yang memungkinkan mereka memonitor proses keluar-masuknya warga desa ke luar negeri, dan bersinergi dengan banyak pihak untuk membuat program pemberdayaan. *Keempat*, membuka peluang adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi yang menjadi alternatif penghasilan bagi para eks PMI. Hadirnya Perdes ini juga berguna untuk memperkuat basis legitimasi kerja-kerja kader DESBUMI secara berkesinambungan melalui alokasi Dana Desa untuk kegiatan DESBUMI.

Summary

This case study examines changes in the Central Lombok research village following the enactment of a Village Regulation on the Protection of Indonesian Migrant Workers in 2015. This Village Regulation responded to problems faced by female and other migrant workers during the course of their employment, from departure, to working overseas and returning home. A lack of information about safe migration and the risks associated with undocumented migration lie at the heart of these problems. Due to this lack of information, women, and in particular, female heads of families anxious about financial security became the main targets of brokers offering seemingly easy paths to become migrant workers. This has resulted in many women in this Central Lombok village departing without proper documentation or via the correct procedures. Consequently, if women experience problems or hardship during their employment overseas, it is challenging for the government to provide diplomatic assistance as they have little or incorrect information.

This lack of information about safe migration prompted Migrant CARE and its local partner the Panca Karsa Association (PPK) to support villagers to form the DESBUMI – Villages that Care for Migrant Workers – and to support village women to establish a women’s group for former migrant workers and their families called “La Tansa”, the name coming from an Arabic phrase meaning “do not forget”. This group provides a space for women to strengthen networks, friendships, and support from other women to advocate for the protection of migrant workers in Central Lombok, as well as to help strengthen their economic capacities.

Village women and PPK initially conducted a survey on mobility in order to convince the village government of the importance of acting on migrant worker issues. Based on this data (which was used to advocate to the village government for support), women DESBUMI cadres began disseminating information about safe migration and information on legal document services for prospective migrant workers.

Shortly after DESBUMI’s formation, ex-migrant worker women and families of current overseas workers organised themselves as the “La Tansa” Migrant Workers Observer Group. This group is an extension of the DESBUMI, and its members in various hamlets in the research village report to DESBUMI when issues related to migrant work arise. La Tansa has provided information about safe migration to other villagers and as a result many prospective migrant workers have since sought to get permission and documentation through official channels rather than using recruiters. La Tansa also aims to increase the livelihood skills of ex-migrant worker women through training sessions in wet and dry cake making and a variety of craft techniques. Following training, women can borrow equipment from the group to produce cakes to sell, which has provided an income to many members of the group. For some members, profits from the sale and special orders of cakes and chips has financially supported them to the extent that they do not wish to return to working overseas.

DESBUMI and the La Tansa women’s group have effectively utilised their networks with members of the village elite to produce policy change. Three years subsequent to the formation of DESBUMI, the village government issued Village Regulation No. 4, 2015 on the Protection of Overseas Indonesian Migrant Workers from Villages in Central Lombok, which was formed with inputs from village women and the support of the PPK.

This Village Regulation has resulted in four important changes in the village. *First*, due to the central role of DESBUMI and La Tansa in effecting this change, women have become more confident in sharing their opinions and influencing public policy in the village. *Second*, the legal processing of documents in the village through DESBUMI has reduced problems and experiences of violence faced by migrant worker women. *Third*, DESBUMI cadres have assisted the village government in compiling migration data, which has enabled monitoring of migrant workers embarking and returning from abroad, as well as collaborative efforts to create targeted empowerment programs. *Fourth*, this regulation has created opportunities for economic empowerment that provide an alternative source of income for ex-migrant workers. The Regulation has strengthened the legitimacy of DESBUMI cadres and the La Tansa women’s group and ensures the sustainability of these groups through an allocation of village budget funds to DESBUMI programs.

Pendahuluan

Studi kasus ini berfokus pada bagaimana DESBUMI dan Kelompok Pemerhati Pekerja Migran mendorong terbitnya Perdes Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di desa penelitian di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan bagi calon PMI, yang menjadi target utama calo pekerja migran, dan penguatan ekonomi bagi perempuan mantan PMI yang tidak lagi bekerja di luar negeri.¹

Menjadi pekerja migran adalah salah satu alternatif sumber penghidupan yang populer di desa penelitian di Lombok Tengah. Ketika area persawahan di desa tidak lagi bisa menjanjikan sumber penghasilan yang memadai, dan masyarakat tidak memiliki keterampilan dan modal yang cukup untuk berwiraswasta, menjadi pekerja migran adalah opsi utama sumber penghidupan warga guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Menjadi pekerja migran ini menjadi kesempatan yang mudah tersedia karena para calo senantiasa berkeliaran di desa untuk membujuk targetnya untuk mendaftar menjadi pekerja migran. Para calo ini menawarkan iming-iming pengurusan yang dipermudah dan tidak berbelit-belit, dengan gaji yang berlimpah, bahkan menyediakan dukungan dana bagi keluarga yang ditinggalkan.

Perempuan desa, terutama perempuan kepala keluarga adalah target empuk para calo ini. Para perempuan kepala keluarga yang rentan secara psikologis dan ekonomi cenderung mudah terjerat bujuk rayu calo tanpa memedulikan risiko dari pilihannya. Apalagi pada umumnya mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai migrasi aman. Akibatnya, banyak masalah yang muncul dari proses pemberangkatan, selama bekerja, hingga saat kembali ke desa. Kondisi demikian yang mendorong kader DESBUMI dan Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa” didampingi oleh Perkumpulan Panca Karsa (selanjutnya kami sebut PPK) mendesak dikeluarkannya peraturan desa (perdes) untuk melindungi pekerja migran. Perdes ini kemudian membuat banyak perubahan bagi pekerja migran dan eks pekerja migran di desa.

Perdes No. 5 tahun 2015 memberi basis legitimasi kepada DESBUMI dan juga Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa” untuk melakukan kegiatan di desa. Kegiatan-kegiatan mereka berdampak pada penguatan kapasitas perempuan untuk berkontribusi di ruang publik desa, dan kegiatan pemberdayaan secara sosial dan ekonomi. Para perempuan yang terlibat dalam kegiatan La Tansa menjadi sangat aktif menyuarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh PMI asal desa penelitian. Ruang-ruang informal yang mereka miliki, seperti obrolan waktu senggang atau melalui media sosial, menjadi kanal bagi para perempuan untuk menyampaikan masalah mereka kepada anggota La Tansa. Anggota La Tansa akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada kader DESBUMI untuk ditindaklanjuti.

“Yang pertama lebih mengetahui informasi tentang buruh migran, dari yang awalnya dulu sama sekali tidak tahu, bagaimana proses keberangkatan, kami tidak pernah sama sekali untuk berfikir tentang ini ya masalah sosial, jarang ini kan dulu, di kampus juga kan tidak ikut di kegiatan kemahasiswaan, karena kita terikat dengan waktu jadi harus bener-bener ini, gitu. Terus yang kedua lebih mengenal masyarakat sendiri. Jadi kan kita lebih tau “oh ternyata [desa penelitian di Lombok Tenga]h itu begini” yang dulu kan kita hanya taunya ya sekitar komplek sekitar saja, jadi kan setelah itu kan jadi tau.” (Gita, Ketua DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Perdes perlindungan TKI ini juga memfasilitasi Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa” untuk melakukan kegiatan perlindungan PMI yang akan berangkat dan penguatan ekonomi mereka di desa. “La Tansa” adalah ujung tombak kegiatan DESBUMI dalam menjaring informasi mengenai para perempuan yang menjadi TKW. Perempuan yang tergabung dalam “La Tansa” adalah *peer* (teman sebaya) yang memudahkan

¹ Semua nama yang digunakan di dalam studi kasus ini telah disamarkan dan bukan nama sebenarnya.

para perempuan lain untuk menyampaikan masalah para pekerja migran. Informasi ini yang selanjutnya diteruskan ke kader DESBUMI untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, bagi eks PMI, La Tansa memfasilitasi pelatihan-pelatihan keterampilan pengolahan pangan beserta alat-alat pendukung guna membantu para perempuan untuk mendapatkan sumber penghasilan baru. Alternatif kegiatan ekonomi ini menjadi salah satu jalan untuk menahan laju perempuan kembali menjadi pekerja migran.

“Kami yakin sebenarnya mereka yang ke sana itu karena mungkin alasan ekonomi itu yang pertama. Saya rasa dan saya yakin mereka masih punya keterampilan kemampuan untuk mereka bisa kembangkan di desa tetapi pertama memang kita tidak pernah perhatikan itu. Makanya dengan ada DESBUMI ini jadi kita tahu sebenarnya bagaimana sih mereka dididik dan terbukti mantan-mantan [pekerja migran] itu sudah bisa membuat usaha sendiri di samping memang kita berikan pelatihan.” (Danang, Sekretaris Desa, desa penelitian di Lombok Tengah, 5 Juli 2019)

Studi kasus ini akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di desa Lombok Tengah ini melalui 7 bagian utama. Bagian *pertama* akan memaparkan konteks sosial ekonomi desa sebagai latar belakang permasalahan PMI di desa. Bagian *kedua* akan membahas persoalan yang dihadapi perempuan desa. Bagian *ketiga* memaparkan pembentukan kelompok kolektif perempuan di desa, yaitu Kader DESBUMI dan Kelompok La Tansa. Kedua kelompok ini memberikan sarana penting untuk penguatan kapasitas perempuan, baik secara individu maupun kelompok. Bagian *keempat* menguraikan perubahan yang terjadi di kalangan perempuan desa, baik dalam bentuk norma sosial dengan adanya tumbuhnya kesadaran perempuan atas hak mereka dan peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik, maupun perubahan dalam bentuk kebijakan Perdes No. 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri Asal Desa di Lombok Tengah. Selanjutnya bagian *kelima* akan menjelaskan tentang strategi Perkumpulan Panca Karsa untuk masuk ke desa dan memengaruhi kebijakan desa. Bagian *keenam* akan menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perubahan. Bagian *ketujuh* menjelaskan langkah selanjutnya dalam mengatasi permasalahan migrasi ilegal di desa. Terakhir akan ditutup dengan beberapa catatan mengenai hal-hal yang bisa dilakukan di masa yang akan datang.

1. Konteks Sosial Ekonomi Desa

Desa penelitian di Lombok Tengah ini merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Praya Barat Daya yang sebagian besar penampang wilayahnya berupa lahan pertanian (BPS, 2018, 7). Kondisi ini menjelaskan mengapa banyak warganya bekerja di sektor pertanian. Meskipun sebagian besar wilayah desa adalah persawahan, banyak dari warga desa yang hanya menjadi buruh tani karena adanya peralihan kepemilikan lahan ke orang luar desa. Hasil tani juga tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena sangat bergantung pada cuaca dan musim. Akibatnya, sektor agraria tidak lagi menjadi mata pencaharian yang menjanjikan bagi warga. Banyak warga desa ini kemudian beralih profesi, salah satunya adalah menjadi pekerja migran.

Desa ini menyumbang jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) terbesar se-Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. Tercatat pada tahun 2017, dari total 7.053 jiwa populasi warga desa ini, 21% di antaranya (1518 jiwa) memilih bekerja di luar negeri dan setengahnya adalah perempuan (BPS, 2018, 31). Minimnya lapangan kerja di desa yang menjamin penghidupan sementara kebutuhan hidup yang terus bertambah (seperti sekolah anak, perbaikan rumah, kendaraan) menjadi faktor utama yang mendorong warga desa mengadu nasib ke negeri orang.

Bagi beberapa perempuan di desa ini, keinginan bekerja ke luar negeri semakin besar setelah mereka menjadi kepala keluarga, baik karena bercerai atau ditinggal mati oleh suami. Masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga hingga berujung pada perceraian dan membuat perempuan

sebagai kepala keluarga yang harus menanggung biaya rumah tangga mereka sendiri. Para perempuan kepala keluarga ini mengalami masalah ekonomi yang berat. Secara umum, sebagian besar perempuan di desa tidak mempunyai pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal, sehingga mereka bergantung kepada suami untuk kebutuhan sehari-hari. Bagi sebagian perempuan yang bekerja, mereka mempunyai beban ganda untuk mengurus urusan domestik rumah tangga dan mencari nafkah. Perceraian atau kematian suami menyebabkan mereka kehilangan sumber nafkah, padahal mereka memiliki tanggungan kehidupan anak-anak, sehingga mereka terpaksa menjadi PMI untuk mengubah nasib dan menghilangkan keresahan hati mereka.

Pada umumnya perempuan desa yang menjadi pekerja migran akan memilih ke negara Arab Saudi karena dua pertimbangan.² *Pertama*, mereka dapat memperoleh penghasilan yang relatif besar walau dengan pendidikan dan keterampilan minimal yang mereka miliki. Gaji bulanan yang besar sekitar 600-2.500 Riyal atau setara dengan Rp2,2 juta-Rp9,4 juta (dengan kurs rupiah Rp3.747,00).³ Angka tersebut relatif lebih tinggi dari standar upah minimum Kabupaten Lombok Tengah 2019 yakni Rp2,1 juta per bulan. Dengan keterbatasan keterampilan perempuan, sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan lokal dengan upah sesuai UMR (Upah Minimum Regional). Tidak heran banyak warga yang memilih untuk bekerja keluar negeri sebagai alternatif jalan singkat untuk mendapatkan sumber penghidupan. Pertimbangan kedua adalah bekerja ke Arab Saudi memberikan peluang bagi mereka untuk menunaikan ibadah haji. Pekerja migran laki-laki cenderung akan memilih ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan karena alasan bahasa dan budaya yang hampir sama dengan di Indonesia.

“Demi perubahan ekonomi lah. Karena di sini kan sulit, waktu itu belum bisa bikin-bikin seperti ini. Makanya jalan satu-satunya cuma itu, untuk mengubah ekonomi karena susah di sini.” (Hj. Nisa, Ketua La Tansa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

“Pertama karena faktor ekonomi, kebutuhan keluarga, untuk sekolah (anak-anak) dan lain sebagainya kebutuhan rumah. Ya sekolah terutama yang membuat mereka itu. Karena ingin melihat perubahan ekonomi di desanya. Peluang kerja (di desa) juga kecil, jadi dia lebih milih untuk kerja keluar. . . biasa kan (yang pergi ke luar negeri) yang punya suami, atau yang janda [perempuan kepala keluarga] yang tidak punya suami. Janda [perempuan kepala keluarga] itu karena ingin melihat perubahan ekonomi di desanya. Karena kadang-kadang gelisah, karena si kecil sudah biasa dengan terima ini apa jadi kadang-kadang itu yang membuat dia tertarik kembali (ke luar negeri).” (H. Haris, mantan Kades, desa penelitian di Lombok Tengah, 07 Juli 2019)

Para pekerja migran ini pada umumnya menjalani kontrak kerja selama dua tahun, lalu kembali ke Indonesia. Tapi ada juga pekerja migran yang dalam dua tahun masa kontraknya tersebut memilih kabur dari majikannya karena berbagai alasan (misalnya gaji tidak sesuai, tidak betah, pekerjaan berat) dan menjadikannya pekerja migran yang ilegal.⁴

Bukan perkara mudah memang bagi warga desa untuk mengadu nasib keluar negeri. Terdapat berbagai prosedur (seperti surat izin dari desa dan keluarga) dan syarat-syarat dasar lainnya seperti usia dan keterampilan yang harus dimiliki, yang harus dipenuhi calon pekerja migran sebelum mereka berangkat. Pengetahuan yang masih rendah terkait proses migrasi aman membuat para calon pekerja migran asal desa ini menjadi sasaran “empuk” para calo/Pekerja Lapangan (PL). Para calo ini adalah perpanjangan tangan dari perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Mereka tinggal di desa tersebut ataupun di desa-desa tetangga, dan mengenal baik warga desa. Mereka setiap hari berkeliling di desa untuk mendapatkan informasi mengenai warga yang ingin berangkat menjadi pekerja migran. Para perempuan kepala keluarga,

² Berdasarkan FGD dengan perempuan anggota La Tansa, di desa penelitian di Lombok Tengah.

³ Hasil dari wawancara dengan berbagai narasumber.

⁴ Wawancara dengan Nada, Kader DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 6 Juli 2019.

apalagi yang baru saja bercerai, sangat rentan menjadi target calo. Kondisi psikologis mereka yang tidak stabil akibat perceraian, ditambah persoalan ekonomi yang melilit, menjadikan tawaran untuk menjadi PMI di luar negeri sebagai solusi murah dan mudah. Sebagai imbalan atas jasanya, PL/Calo meminta bayaran hingga jutaan rupiah.

“Lewat calo tapi calonya tidak sesuai dengan perjanjian, tapi kita kan ngasih uang perjanjian waktu itu saya ngasih 2 juta perjanjian nggak sampe 1 bulan langsung berangkat, tapi ternyata 3 bulan di PT [Jasa Penyaluran Tenaga Kerja] nunggu, calo kan cuma masukin kita ke kantor ke Jakarta terus langsung kita ditinggalin, nggak mau tau.” (Saripah, anggota La Tansa, mantan PMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 9 Juli 2019)

Mudahnya keberangkatan calon pekerja migran dengan menggunakan jasa calo/PL dikarenakan banyak dari calo/PL (walau tidak semua) yang mengakali persyaratan calon TKI seperti dengan memalsukan syarat administratif seperti menaikkan usia calon pekerja migran hingga batas minimum, memalsukan perizinan dari keluarga dan surat keterangan dari desa. Bahkan calon pekerja migran tidak perlu mengikuti *medical check-up* dan pelatihan kerja sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Cara-cara illegal ini berdampak pada minimnya persiapan dan pengetahuan pekerja migran mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan di luar negeri. Mereka seringkali tidak tahu akan pergi ke mana, bekerja apa dan berapa penghasilan yang akan didapatkan.

“Ya tanggal lahir, kadang-kadang tanggal lahirnya belum sampai usia nah gitu-gitulah permainan. Jadi banyak kasus sebetulnya.” (H. Haris, mantan Kades, desa penelitian di Lombok Tengah, 7 Juli 2019)

Selain itu, para calo kerap kali melakukan praktik manipulatif guna menarik minat warga untuk bekerja di luar negeri. Mereka menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi, atau opsi potong gaji selama bekerja, bagi calon pekerja migran untuk menutup biaya keberangkatan. Tak jarang calon pekerja migran juga harus menjual aset yang dimilikinya. Kondisi ini semakin memperburuk kehidupan calon pekerja migran yang pada dasarnya sudah mengalami permasalahan ekonomi.

“Jadi sebenarnya yang jadi persoalan di sini itu kan pertama ketika mereka bermigrasi keluar negeri karena pinjam uang. Pinjam uangnya itu bukan kepada lembaga resmi tetapi kepada rentenir jadi pinjam 1 kembali 3. Jadi ada prioritas utama ketika mereka bekerja di sana itu untuk membayar hutang. Jadi 1x kontrak, 2x kontrak dia mengembalikan uang untuk membayar hutang.” (Halimah, Program Manager PPK, desa penelitian di Lombok Tengah, 5 Juli 2019)

Pemerintah desa sendiri tidak bisa berbuat banyak melihat praktik percaloan bekerja di lingkungannya. Selama ini mereka berusaha menjalankan fungsi pelayanan sesuai dengan permintaan, dan terkadang tidak peduli diajukan oleh siapa dan untuk apa. Ada kemungkinan juga petugas desa mendapatkan uang administrasi dari para calo. Pencatatan arsip kependudukan di desa pun tidak memadai. Alhasil desa tidak memiliki data mobilitas keluar masuk pekerja migran secara sistematis, sehingga saat warganya yang menjadi pekerja migran tersebut mengalami masalah, pemerintah desa sering tidak mengetahui bahwa korban adalah warganya, dan justru kebingungan harus mengambil tindakan seperti apa.

Kondisi pekerja migran di desa yang penuh masalah ini berlangsung bertahun-tahun dan tidak pernah menjadi prioritas di desa, hingga pada tahun 2012 Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Mataram bermitra dengan Migrant CARE melalui Program MAMPU datang ke desa-desa di Lombok Tengah untuk melakukan serangkaian kegiatan guna memunculkan kesadaran para aparat desa akan pentingnya melakukan perlindungan pada warga mereka, sekaligus mencari opsi guna penanganan masalah pekerja migran ini.

2. Permasalahan Perempuan

Persoalan utama terkait pekerja migran di desa ini dan Lombok umumnya adalah ilegalitas dalam proses keberangkatan yang non-prosedural, yakni tidak sesuai dengan sistem yang ada. Menurut Plt. Kepala Balai

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram, dari tahun 2017-2018 pihaknya telah menerima pengaduan dan memfasilitasi pemulangan PMI bermasalah. Tidak mengejutkan bahwa lebih dari 90% pengaduan dan fasilitasi pemulangan adalah mereka yang berangkat bekerja keluar negeri secara non-prosedural atau ilegal (BNP2TKI, 2019). Hal ini menjadi indikator bahwa keberangkatan PMI non prosedural sangat rentan dengan permasalahan saat mereka tiba di negara tempat mereka bekerja.

Masalah muncul sebelum keberangkatan, ketika penempatan, hingga kepulangan. Sebelum adanya DESBUMI dan La Tansa, tidak ada tempat bagi pekerja migran untuk mengadu jika mengalami masalah. Masalah yang umumnya dialami saat pra penempatan terkait dengan kepengurusan dokumen. Hal ini disebabkan ketidaktahuan warga serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Celah-celah ini kemudian dimanfaatkan calo/PL yang justru menimbulkan masalah baru. Pada periode penempatan, masalah yang acap kali muncul yakni gaji yang tidak dibayar, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, dan kekerasan. Akibatnya, beberapa pekerja migran memilih kabur dari majikannya dan menjadi pekerja ilegal. Sementara itu, pasca kepulangan pekerja migran ke Indonesia, masalah yang dialami adalah pengelolaan remitansi⁵ yang masih digunakan untuk hal-hal sekunder (seperti memperbaiki rumah, membeli kendaraan) daripada untuk investasi atau modal usaha. Alhasil sering kali para pekerja migran ini merasa tidak menghasilkan apa-apa selama bekerja di luar negeri yang kemudian mendorong mereka untuk kembali berangkat ke luar negeri, dan terjadi siklus tanpa henti. Karena para mantan pekerja migran ini kurang memiliki keahlian lain, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di desa, sehingga jalan keluarnya adalah dengan mencari nafkah ke luar negeri.

Negara tujuan sebagian besar buruh migran dari desa ini adalah Malaysia dan Arab Saudi. Meskipun sudah ada kebijakan moratorium pengiriman buruh migran ke negara-negara Timur Tengah sejak 1 Juli 2015, hingga sekarang masih saja ada pekerja migran dari desa ini, khususnya perempuan, yang berangkat bekerja ke Arab Saudi secara ilegal. Arab Saudi tetap menjadi tujuan karena menjadi pekerja migran bagi warga desa ini bukan semata karena tujuan ekonomi, namun juga karena tujuan religius. Sekali dayung, dua pulau terlampaui; bekerja menjadi buruh migran berbonus umroh/haji. Sebagai masyarakat religius dengan basis tradisi NU yang kuat, bisa melaksanakan umroh/haji atau memberangkatkan orangtuanya untuk menjalankan umroh atau haji adalah sebuah impian. Mereka akan berusaha dengan cara apapun untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Menjadi PMI di negara-negara Arab menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan mimpi tersebut. Karena alasan kesamaan agama dan kemungkinan bisa beribadah/membahagiakan orang tua, banyak perempuan memilih menjadi pekerja migran di Arab Saudi dibanding negara-negara yang menerapkan jaminan keamanan kerja seperti Hongkong.

“Malah ga ada kalau ke Hong Kong soalnya kan kaya, kaya gini kalau ke Hong Kong pemahaman mereka kan di sana, kalau kita [Pekerja Migran Indonesia di desa] kan rata-rata muslim, kan takutnya nanti kan ga dikasih kita waktu sholat atau apa kaya gitu, suruh pegang anjing, suruh masakin daging babi, itu yang ga mereka mau.”
(Rani, Eks PMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 6 Juli 2019)

Data migrasi penduduk desa di Lombok Tengah menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menjadi PMI sebagian besar adalah para perempuan kepala keluarga. Jumlah perempuan kepala keluarga *de facto* cukup banyak di Lombok secara umum (Platt 2017, 118). Bahkan menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah, banyaknya jumlah perempuan kepala keluarga ini merupakan salah satu masalah perempuan yang memprihatinkan di kabupaten ini.⁶

⁵ Remitansi adalah uang atau barang yang dikirimkan oleh TKI ke daerah asal.

⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah, Kantor DP3AP2KB, 3 Juli 2019.

Banyaknya perempuan kepala keluarga di desa ini adalah implikasi dari perkawinan yang kental diwarnai nilai tradisi dan pemahaman agama yang tidak menguntungkan perempuan. Perceraian di masyarakat desa ini bisa dilakukan dengan sangat mudah dan sepihak (*unilateral*). Praktik ini yang sering disebut dengan “baseang” yakni pemutusan perkawinan dari pihak suami (Ni'mah, 2017, 313). Jika seorang suami sudah mengatakan “saya ceraikan kamu”, maka talak sudah jatuh dan si istri harus segera keluar dari rumah, kembali ke rumah orang tuanya beserta anak-anak. Sangat jarang ada perceraian yang diurus lewat pengadilan terlebih dahulu. Mereka menganggap, model perceraian “baseang” sudah sah secara agama.

“Akhirnya katakan cerai sama suaminya. Kalo di sini kan begitu bilang talak tiga ya sudah jatuh kan. Tanpa melalui persidangan.” (Kepala Bagian Penempatan, Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah, desa penelitian di Lombok Tengah, 3 Juli 2019)

Pada saat yang sama, tradisi Sasak mengajarkan kepada para perempuan, jika suami sudah menceraikan seorang perempuan, maka pantang bagi perempuan tetap berlama-lama di rumah yang didiami suami meskipun rumah tersebut hakikatnya dibangun bersama-sama (Ni'mah, 2017, 322). Harga diri perempuan dipertaruhkan ketika seorang suami sudah mengucapkan kata cerai. Maka jalan satu-satunya, perempuan tersebut harus keluar rumah.

Para perempuan kepala keluarga inilah yang menjadi sasaran empuk para calo/PL/sponsor untuk direkrut menjadi PMI di luar negeri. Dengan iming-iming kehidupan yang lebih baik dan pengurusan yang mudah, para perempuan ini memilih menjadi PMI melalui calo.

“Iya informasi kalau ada nanti calon yang mau berangkat kaya gitu. Kalau janda [perempuan kepala keluarga] mah banyak janda [perempuan kepala keluarga] di sini, pasti ke sini. Udah saya ceritain tadi kan bu ya yang banyak sering direkrut itu kan janda [perempuan kepala keluarga], cepet.” (Rani, eks PMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 6 Juli 2019)

Namun sayangnya, tidak semua calo bertanggungjawab mengikuti prosedur pemberangkatan dengan benar. Bahkan, atas nama kemudahan berangkat para calo dengan mudah memalsukan dokumen, misalnya dengan mengganti tahun kelahiran di KTP, mengubah umur, hingga mengubah alamat. Dokumen yang tidak sesuai dan prosedur yang tidak taat aturan inilah yang seringkali menjadi sumber masalah. Para PMI menjadi sulit dibantu karena dokumen mereka yang tidak benar. Mereka tidak dikenali sebagai warga desa, akibat alamat yang berubah dan umur yang tidak sesuai aslinya. Praktik migrasi yang tidak aman inilah yang menjadi masalah perempuan di desa di Lombok Tengah.

3. Pembentukan Kader DESBUMI dan La Tansa

Salah satu cara yang dapat dijalankan untuk mengatasi isu migrasi ilegal dan memutus rantai kemiskinan perempuan desa adalah dengan sosialisasi migrasi aman dan prosedural. Untuk menempuh hal ini, Perkumpulan Panca Karsa melakukan beberapa program kerja utama di desa, dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas perempuan untuk mandiri dan berdaya secara ekonomi dan sosial. Program ditujukan untuk PMI yang akan berangkat, dan yang sudah kembali. Tujuan ini dicapai dengan 3 program kerja yaitu pengorganisasian, penguatan ekonomi dan advokasi.⁷ Di tahap awal pengorganisasian, pemetaan PMI digunakan untuk data advokasi dan pembentukan kelompok. Pengorganisasian lalu dilakukan dengan membentuk kader DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) dan menginisiasi berdirinya kelompok perempuan pemerhati pekerja migran “La Tansa” sebagai ruang untuk penguatan kapasitas perempuan. Setelah itu mereka melakukan kegiatan pendampingan dan penguatan ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan ekonomi kreatif. Dari kegiatan ekonomi ini diharapkan para perempuan ini mendapatkan

⁷ Wawancara dengan Halimah, Manager Program PPK, Lombok Tengah, 2 Juli 2019.

penghasilan tambahan dan tidak tertarik untuk kembali menjadi pekerja migran di luar negeri. Pada akhirnya, kapasitas yang dimiliki perempuan ini menjadi basis bagi mereka untuk melakukan advokasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan perempuan pekerja migran di desa.

Kader DESBUMI

Terbentuknya kader-kader DESBUMI di desa penelitian adalah salah satu amanat dari Perdes Perlindungan TKI, namun keberadaan DESBUMI di desa ini sendiri sudah ada jauh sebelum Perdes disahkan. DESBUMI hadir bersamaan dengan hadirnya para kader perempuan yang melakukan survei mobilitas penduduk. Survei ini dilakukan pada tahun 2013, saat itu Panca Karsa dengan Tania sebagai Staff Pelaksana Lapangan berusaha untuk mengetahui pengalaman, permasalahan dan kebutuhan para mantan pekerja migran di desa. Survei menjadi cara untuk meyakinkan pemerintah dan masyarakat desa bahwa banyak masalah yang dialami pekerja migran asal desa ini dan perlu mendapat perhatian serius. Survei ini dilakukan oleh Tania, dibantu oleh dua orang kader perempuan atas rekomendasi pemerintah desa, yaitu Gita dan Yana, dan bertambah dua orang lagi pada tahun 2014, Nada dan Maya. Penambahan kader dilakukan dengan pertimbangan besarnya populasi responden survei. Merekalah yang kemudian menjadi kader awal DESBUMI. Dalam proses pengorganisasian masyarakat, PPK bersama dengan kader DESBUMI melakukan kerja penyadaran kritis kepada warga desa mengenai persoalan-persoalan yang dialami pekerja migran di desa mereka dan mengorganisir diri untuk mencegah migrasi yang tidak aman.

“Makanya pendekatan yang kita lakukan itu adalah, yang pertama itu kita mencoba untuk bagaimana memberikan penyadaran kritis terhadap masyarakat dulu. Sehingga masyarakat yang tadinya kalau dia tau ada kasus-kasus pekerja migran di desanya, mereka seolah “yaudah itu kan urusannya dia yang berangkat”. Akhirnya itu yang kita coba untuk pendekatan kepada masyarakat, bagaimana bahwa kasus-kasus buruh migran ini sebenarnya bukan urusannya dia dan keluarganya saja, tetapi ini menjadi urusannya kita juga. Kemudian setelah mereka memiliki kesadaran, mereka ada komitmen dari diri mereka bahwa ini adalah persoalan kita bersama.” (Tania, staf PPK, Lombok Tengah, 2 Juli 2019)

DESBUMI di desa penelitian diketuai oleh salah seorang perempuan desa, Gita, yang juga merupakan salah satu keponakan kepala desa saat itu, yang juga tergolong kaum bangsawan di desa. Berbekal modal sosial yang kuat, pendidikan yang tinggi, serta pengalaman selama terlibat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa (PNPM) Mandiri di desanya pada tahun 2013, Gita menjadi perempuan ujung tombak penggerak kelompok DESBUMI di desa. Keterlibatan Gita dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan berlanjut ketika Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Mataram memulai program perlindungan pekerja migran di desanya tahun 2014.

“Beda juga sih, kalau di PNPM kan tidak (seperti) ini, sudah ada kader yang membantu jadi tidak kita yang sendiri yang ngajak, misalnya kita mau pelatihan untuk ibu-ibu hamil, tinggal kasih undangannya di kader masing-masing dusun, sudah, kita tinggal nunggu di kantor desa, kalau di DESBUMI ini kan benar-benar kita door to door.” (Gita, Ketua DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Tugas pertama yang Gita kerjakan adalah melakukan pendataan mobilitas penduduk. Kegiatan ini membutuhkan ketangguhan dan kesabaran. Gita harus mendatangi satu per satu keluarga pekerja migran untuk menanyakan mengenai keberangkatan, negara tujuan, lama kontrak, dan lain-lain. Ketiadaan data ini juga menuntut kreativitas Gita untuk bertanya kepada responden mengenai siapa lagi yang bisa didata di sekitar rumah responden. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, Gita tidak hanya dituntut untuk bekerja keras mengetuk satu per satu rumah penduduk, akan tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar warga mau berbagi data pribadi. Dalam hal ini, modal sosial yang dimiliki Gita sangat berguna.

"Setelah adanya pendataan itu, terus kita disuruh entry, barulah ditetapkan jadi kader, baru diadakan kegiatan-kegiatan, setelah terorganisir baru kita mulai mengumpulkan masyarakat." (Gita, Ketua DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Data migrasi penduduk hasil kerja Gita dan kawan-kawan inilah yang menjadi dasar bagi PPK untuk mendesak pemerintah desa untuk membuat DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran).

"Awalnya, kan dari data mobilitas, karena banyak sekali masyarakat desa [penelitian] yang pergi ke luar negeri kemudian akhirnya supaya ada tempat, mereka kan selama ini tidak tau kalau misalnya ada permasalahan, terus siapa yang berangkat, siapa yang pulang itu kan tidak ada sama sekali datanya di kantor desa, nah akhirnya supaya ada tempat buat untuk pengaduan kasus dan, pengaduan dan informasi yang berkaitan dengan buruh migran, maka dibentuklah DESBUMI ini." (Gita, Ketua DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Salah satu perubahan yang paling Gita rasakan setelah terlibat dalam kegiatan DESBUMI adalah kepekaannya melihat persoalan sosial yang ada di sekitarnya. Sebelum menjadi bagian dari DESBUMI, Gita tidak begitu peduli dengan persoalan pekerja migran di sekitarnya. Ada banyak tetangga dan kerabatnya yang menjadi pekerja migran, akan tetapi tidak mengusik nuraninya untuk berpikir tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. DESBUMI memberinya peluang untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus mengasah kepeduliannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Yang pertama lebih mengetahui informasi tentang buruh migran, dari yang awalnya dulu sama sekali tidak tahu, bagaimana proses keberangkatan, kami tidak pernah sama sekali untuk berfikir tentang ini ya masalah sosial, jarang ini kan dulu, di kampus juga kan tidak ikut di kegiatan kemahasiswaan, karena kita terikat dengan waktu jadi harus bener-bener ini, gitu. Terus yang kedua lebih mengenal masyarakat sendiri. Jadi kan kita lebih tau "oh ternyata [desa penelitian di Lombok Tengah] itu begini" yang dulu kan kita hanya taunya ya sekitar komplek sekitar saja, jadi kan setelah itu kan jadi tau." (Gita, Ketua DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Setelah DESBUMI terbentuk, perempuan desa yang tergabung ke dalamnya, termasuk Gita, aktif melakukan advokasi mengenai perlindungan pekerja migran, dengan menyebarkan informasi mengenai praktik migrasi aman dan juga pelayanan pengurusan dokumen yang legal.

"Kita sosialisasi, dari masing-masing dusun, per dusun dulu kan dibuatkan jadwal misalkan yang 11 dusun, awalnya dulu kan 11 dusun, itu kita bagi, misalnya hari ini dapat di dusun apa saja, nah kita rame-rame ke sana turun, nanti kita hubungi minta tolong sama Kadus, untuk kita juga ikut terus nanti dari Pak Kadus kan kita tanya siapa aja, selain dari hasil pendataan dulu kan kita bisa tau juga siapa yang sudah pernah pergi, kalau orang yang kita kenal berarti itu yang langsung kita kasi undangan sendiri, kekurangannya baru minta tolong Pak Kadus." (Gita, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Menjadi pemimpin DESBUMI juga menuntut Gita memiliki kemampuan komunikasi publik yang mumpuni. Meskipun sudah terlatih untuk menjadi guru, namun bagi Gita, berbicara di depan orang dewasa membutuhkan keterampilan tersendiri. Keterlibatannya dalam kegiatan DESBUMI mengasah kemampuannya dalam komunikasi publik.

"Tidak pernah diajarkan sebelumnya, jadi sebelum mau tampil itu kita persiapkan dulu kira-kira apa yang harus (disampaikan) ini, kadang dilatih juga. ndak papa sudah sambil dibaca". Dibaca dulu katanya kalau belum hapal, jadi pelan-pelan kita belajar komunikasi." (Gita, Ketua DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Modal sosial, kemampuan pribadi dan hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa yang dimiliki oleh Gita membantu DESBUMI untuk memperoleh dukungan dari pemerintah desa. Keberadaan DESBUMI disambut

positif oleh pemerintah desa karena dapat membantu kerja mereka. Pendataan buruh migran yang berhasil dikumpulkan oleh DESBUMI dan para kadernya membantu pemerintah desa untuk mengawasi dan mengumpulkan data mobilitas warganya yang menjadi PMI. Sebelum adanya Desbumi, Pemerintah Desa tidak memiliki data mengenai migrasi penduduk dan kurang mengawasi keberangkatan pekerja migran di desa penelitian.

“Keberadaan DESBUMI ini, sangat membantu pemerintah desa. Yang tadinya desa tidak punya data, sekarang sudah punya. Yang tadinya masyarakat tidak mau melaporkan siapa saja yang berangkat, sekarang mereka sudah melalui desa. Termasuk juga kasus-kasus yang terjadi di desa Desa ini, sudah mampu difasilitasi oleh teman-teman kader DESBUMI. Nah itulah manfaatnya, sehingga kan kita tidak hanya mengeluarkan uang, tapi tidak banyak kerjaan. Terbantulah mereka. Harusnya tanggungjawab desa, itu dilimpahkan ke mereka ini.” (H. Haris, mantan Kades, desa penelitian di Lombok Tengah, 7 Juli 2019)

Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa”

Kelompok Perempuan Pemerhati Buruh Migran “La Tansa” terbentuk atas inisiasi Panca Karsa, DESBUMI dan pemerintah desa untuk mawadahi dan memberdayakan perempuan mantan pekerja migran dan perempuan keluarga pekerja migran melalui serangkaian kegiatan. Kelompok ini turut membantu DESBUMI dalam mensosialisasikan migrasi aman dan menerima pengaduan dari masyarakat yang didapat melalui obrolan-obrolan ringan antar tetangga, kemudian dilaporkan ke DESBUMI untuk ditindaklanjuti. Cara informal ini dirasa lebih efektif mengingat posisi rumah di desa yang saling berdekatan sehingga informasi lebih cepat menyebar dari mulut ke mulut daripada cara-cara formal, seperti sosialisasi di balai desa.

“Kelompok Pemerhati Pekerja Migran ini memang lahirnya atas dasar kebutuhan juga sih. Di mana masyarakat yang tadinya mereka itu kalau berangkat ke luar negeri minjem sama rentenir. Termasuk ketika juga mau membuka usaha, minjemnya sama rentenir. Akhirnya dibuat kelompok untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Mereka itu misalnya ketika ada isu-isu atau kasus pekerja migran, atau ketika ada masyarakat yang mau berangkat atau pulang dari luar negeri, maka teman-teman kader ini kan dari semua dusun. Teman-teman kader ini yang akan melaporkan ke DESBUMI, mereka berkoordinasi.” (Tania, staf PPK, Lombok Tengah, 02 Juli 2019)

Kelompok “La Tansa” dipimpin oleh Hj. Nisa, salah seorang perempuan desa mantan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Dengan bantuan kader DESBUMI, dia bersama sekitar 30 perempuan eks PMI dan keluarga mereka membentuk Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa”. Pilihan nama ini karena beliau teringat kata yang sering diucapkan oleh majikannya ketika masih bekerja di Arab Saudi yang berarti “jangan lupa”. Karena kekritisannya dan juga keaktifannya di setiap pertemuan eks pekerja migran, dia didaulat menjadi ketua. Selain itu, pengalaman beliau selama menjadi PMI menumbuhkan perhatiannya terhadap isu migrasi ilegal dan dampaknya bagi pekerja migran. Beliau melihat status ilegal banyak pekerja migran asal Indonesia di Arab Saudi membuat mereka tidak memiliki posisi tawar untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

“Tapi saya heran ya, di sana itu kok yang diambil di agency sana langsung itu kok dia itu ada peraturan sendiri, orang Srilanka, Filipina, itu peraturan sendiri, kalau mau gaji segini, mau ndak, ada persyaratannya. Kalau kita orang Indonesia kan bukan kita yang bikin persyaratan, majikan yang bikin. Kalau [pekerja migran dari negara lain] ndak, dia [pekerja migran dari negara lain] yang bikin persyaratan. “Mau nggak gaji saya segini? Kerjaan saya hanya ini”, nggak mau mereka disuruh kerja tambah-tambah. Misalnya ngurus orang tua, ya ngurus orang tua saja kerjanya, nggak mau masak, dll.” (Hj. Nisa, Ketua La Tansa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Tujuan utama pendirian kelompok La Tansa ini adalah agar para eks PMI dan keluarganya memiliki kegiatan ekonomi yang menghasilkan pemasukan berupa membuat kue-kue tradisional dan juga keterampilan. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan di La Tansa adalah pelatihan membuat kue-kue basah dan kering, keripik, dan lain-lain. Mereka juga mendapatkan alat-alat memasak untuk mendukung kegiatan ini. Saat ini, kegiatan

usaha kue dan keripik yang dilakukan secara berkelompok ini sangat membantu perekonomian keluarga eks-PMI.

Fokus pada kegiatan ekonomi didasari oleh bagaimana pengetahuan mengenai migrasi aman saja ternyata tidak cukup untuk menahan para perempuan untuk tidak kembali menjadi pekerja migran. Mereka membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kader DESBUMI dan La Tansa berusaha melakukan kegiatan ekonomi sebagai alternatif penghasilan.

“Katanya walaupun sudah berangkat ke Saudi, sudah dapat uang banyak, sudah dapat sepeda motor, rumah, dll, ujung-ujungnya nanti kembali lagi seperti awal. Kembali ke laptop lah. Ujung-ujungnya pasti kembali ke masalah sulitnya ekonomi.” (Hj. Nisa, Ketua La Tansa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan kelompok La Tansa adalah pelatihan pembuatan keripik, kue basah dan kering serta kerajinan. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Modal awal kegiatan ekonomi mereka adalah dari simpanan anggota kelompok. Uang yang terkumpul dari iuran pokok dan wajib inilah yang diputar menjadi modal usaha anggota. Berbekal keterampilan yang diajarkan tersebut, beberapa perempuan mantan pekerja migran dan perempuan keluarga pekerja migran berhasil menghasilkan produk-produk olahan rumah tangga yang bernilai jual cukup tinggi. Secara berkelompok, mereka semakin mandiri secara ekonomi. Penghasilan yang didapat dari membuat kue-kue dan keripik ini, menjadikan mereka tidak lagi ingin bekerja di luar negeri.

Selain melakukan kegiatan ekonomi, Hj. Nisa bersama-sama dengan anggota Kelompok La Tansa sering berdiskusi dan berbagi pengalaman menjadi PMI. Pertemuan bulanan yang dilaksanakan setiap tanggal 1 di kantor desa menjadi ajang berdiskusi dan berbagi, khususnya bagi mereka yang berencana bekerja sebagai PMI. Pengalaman mereka ini penting dalam proses penyadaran mengenai migrasi aman.

“Ya kita ngomong-ngomong masalah ini deh, kita juga kasih informasi misalnya, saling memberi informasi, misalnya ada TKW yang berangkat, pulang, bermasalah. Intinya saling memberi informasi lah.” (Hj. Nisa, Ketua La Tansa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

“Ada yang berangkat, ada yang pulang, ada yang bermasalah, nanti kita kasih tahunya, nanti anggota ini kan kasih informasi ke tetangga, misalnya ada yang mau berangkat ke Saudi, di sini lebih aman, ngurus persyaratan harus lengkap. Jadi nggak dibuat-buat lah. Biasanya kalau dulu kita kan dipalsukan kadang-kadang. Umur KTP dipalsukan.” (Hj. Nisa, Ketua La Tansa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Bersama teman-teman kelompok perempuan ini, mereka menjadi “duta” desa mengenai bahayanya bekerja ke luar negeri tanpa dokumen lengkap dan benar.

“Ya, kalau sebelum kan kita sama sekali nggak tau, walaupun saya pernah ke Saudi, tapi saya nggak tau proses-prosesnya, taunya hanya yang penting sampai ke Saudi aja. Setelah ini ya kita tahulah bagaimana yang aman. Trus pelatihan ini yang bagus banget, kita diajar bagaimana mengelola usaha. Jadi ada pengalamannya. Semenjak di sini kita jadi tau bagaimana proses yang aman untuk sampai ke sana. Walaupun saya sudah sampai ke Saudi, tapi nggak tau saya siapa yang dihubungi kalau misalnya terjadi masalah.” (Hj. Nisa, Ketua La Tansa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

“Kita akhirnya taunya ke kader, terus kaderlah yang menindaklanjuti. Kita sebatas ngasih informasi aja. Yang menindaklanjuti kader. Kita hanya penyambung lidahlah di masyarakat, ke tetangga-tetangga gitu.” (Hj. Nisa, Ketua La Tansa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Strategi penguatan ekonomi dan juga peningkatan kesadaran perempuan ini menjadi strategi penting untuk mensosialisasikan migrasi aman dan prosedural. Selain itu, kedua cara ini terbukti ampuh untuk menekan keberangkatan kembali pekerja migran keluar negeri hingga 60%.

“Jadi lebih itu 60-an persen, agak jarang sekaranglah di sini karena ada kegiatan.” (H. Haris, mantan Kades, desa penelitian di Lombok Tengah, 7 Juli 2019)

4. Perubahan yang terjadi

4.1. Norma Sosial: Kesadaran Hak serta Partisipasi Perempuan di Ruang Publik

Problem utama perempuan di desa yang ingin diintervensi PPK adalah perubahan kesadaran perempuan mengenai peran dan haknya dan aspek legalitas PMI untuk menjamin migrasi aman. Kerja penyadaran hak perempuan dimaksudkan agar para perempuan memiliki pengetahuan mengenai relasi yang setara dalam keluarga, dalam relasi dengan pasangan, sehingga mencegah maraknya perceraian sepihak, yang ujung-ujungnya membuat para perempuan itu menjadi PMI melalui prosedur yang ilegal.

“Karena pertama yang lebih banyak berkasus itu perempuan, terjadi pelecehan di luar negeri, terjadi kekerasan yang dialami. Dan rata-rata juga banyak yang pergi mencari uang itu perempuan, suaminya di sini.” (Nada, kader DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 6 Juli 2019)

Proses pendidikan dan penyadaran ini dilakukan dalam diskusi-diskusi setiap pertemuan bulanan yang dilakukan DESBUMI dan “La Tansa”, dan juga melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas anggota. Dalam diskusi tersebut para perempuan diberi pemahaman bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan memiliki peluang yang sama juga untuk berkontribusi dalam urusan publik, seperti kebijakan di desa. Salah satu keberhasilan dari kegiatan ini adalah para perempuan di desa ini tidak takut lagi datang ke kantor desa untuk menyampaikan aspirasi maupun masalahnya. Sebelum ada intervensi, jangankan mengadu, masuk ke kantor desa pun sangat jarang.

“Nanti mungkin bisa ditanyakan sama teman-teman pelaksana DESBUMI. Jangankan untuk terlibat di dalam Musrenbang, ke kantor desa aja tidak pernah.” (Tania, staf PPK, Lombok Tengah, 02 Juli 2019)

Proses penyadaran juga dilakukan dalam konteks relasi dalam rumah tangga. Perceraian sepihak yang marak di Lombok sangat merugikan perempuan. Apalagi jika kemudian para perempuan ini harus menanggung sendiri kelangsungan hidup anak-anaknya. Karena itu pemahaman mengenai relasi yang setara sangat perlu. Penting bagi perempuan ini menyadari bahwa ia adalah subyek yang independen dan berhak untuk menentukan masa depan perkawinannya. Tidak hanya menerima begitu saja keputusan suami, atas nama tradisi maupun ajaran agama.

Pasca diamanatkan dalam Perdes (yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian selanjutnya), DESBUMI semakin mendapat legitimasi formal ketika berhadapan dengan calo/PL, sehingga berkontribusi pada menurunnya praktik migrasi ilegal. Para kader DESBUMI juga mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat karena keterlibatannya membantu PMI bermasalah. Peran-peran mereka di desa semakin menunjukkan kualitas mereka sebagai kader-kader desa yang bisa diandalkan. Karena itu, mereka mulai dilibatkan menjadi bagian dari tim 9 atau tim 11 dalam merumuskan kebijakan di desa. Mereka juga diundang dalam proses musyawarah di desa yang sebelumnya keterlibatan perempuan desa dalam forum-forum publik sangat minim.

Lebih jauh, perempuan kader DESBUMI dan anggota “La Tansa” juga terlibat dalam jaringan LSM dan individu-individu yang memiliki perhatian terhadap isu pekerja migran di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendorong terbitnya Perda Perlindungan TKI. Dalam proses ini, mereka terlibat dalam *hearing* dan aksi-aksi menjelang pengesahan Perda Perlindungan TKI Kabupaten Lombok Tengah, yang akhirnya disahkan pada tahun 2017.

4.2. Perubahan Peraturan: Perdes No. 4 Tahun 2015 Sebagai Wujud Komitmen Pemerintah Desa

Atas dorongan kader DESBUMI dan Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa” dan didampingi PPK, pemerintah desa mulai merumuskan Peraturan Desa (Perdes) sebagai landasan hukum untuk perlindungan pekerja migran asal Desa. Dipilihnya perdes sebagai instrumen perlindungan tidak terlepas dari target organisasi, Panca Karsa dan Migrant CARE, di tahun 2015 yaitu pembentukan kebijakan yang pro pekerja migran.

“Jadi yang kebijakan itu karena secara menyeluruh di Migrant CARE itu diarahkan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang pro terhadap pekerja migran. Sehingga dari situ, kita mencoba untuk menurunkannya menjadi program-program konkrit yang bisa kita lakukan di masing-masing wilayah.” (Halimah, Manager Program PPK, Lombok Tengah, 2 Juli 2019)

Penyusunan Perdes yang difasilitasi Panca Karsa ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan dan melibatkan berbagai aktor dari berbagai unsur di masyarakat seperti pemerintah desa, Panca Karsa, Kader Desa, tokoh masyarakat, eks pekerja migran dan unsur staf kesehatan. Salah satu poin usulan yang muncul dalam forum tersebut adalah perempuan yang memiliki anak dengan batas usia tertentu, menyusui dan hamil dilarang untuk berangkat. Poin ini merupakan usulan dari anggota La Tansa, tenaga kesehatan dan kepala dusun yang merasa prihatin dengan kondisi anak pekerja migran yang sering kali tidak terurus karena tidak diasuh langsung oleh orang tuanya. Terlepas dari isu peran gender yang muncul dari usulan ini, usulan ini juga menunjukkan bahwa para perempuan eks PMI mampu merefleksikan pengalaman mereka dan mampu menyampaikannya di forum publik.

Selain usulan dari aktor-aktor dalam forum tersebut, hasil survei yang dilakukan kader DESBUMI turut menjadi rujukan substansi dalam perdes. Setelah semua usulan terkumpul, proses *drafting* dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan Panca Karsa untuk kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Dari hasil situ kita survei kan kita buat apa-apa saja yang harus dituangkan dalam Perdes itu. Seperti gimana mereka harus mengurus dokumen mereka, dari mulai sejak mengurus sampai pemberangkatannya. Itu yang poin utama di Perdes itu. Jadinya setelah semua bahan kita terkumpul baru desa membuat rancangannya.” (Danang, Sekretaris Desa, desa penelitian di Lombok Tengah, 5 Juli 2019).

“Baru dibahas bersama BPD untuk menetapkan dan Alhamdulillah disetujui oleh BPD untuk kita buat karena mungkin BPD dengan adanya bukti-bukti yang kita turun di masyarakat jadinya Alhamdulillah kami disetujui membentuk satu lembaga utama yang DESBUMI dan kita bentuk 1 buah Perdes yang khusus menangani masalah TKI.” (H. Haris, mantan Kades, desa penelitian di Lombok Tengah, 7 Juli 2019)

Tepat pada 9 Juli 2015, pemerintah Desa mengesahkan Peraturan Desa No. 4 tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri yang berasal dari desa penelitian. Perdes ini berusaha melindungi pekerja migran dengan mendorong tertib administrasi sehingga dapat mencegah penipuan oleh calo atau PL. Pemerintah desa juga berkomitmen untuk memfasilitasi forum diskusi, pusat informasi, dan pengaduan serta pendampingan penyelesaian kasus bagi TKI asal desa ini, salah satunya bekerjasama dengan DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran), sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Migrant CARE di berbagai wilayah yang menjadi kantong PMI. Sebelum diamanatkan dalam Perdes, keempat kader perempuan yang membantu Panca Karsa sebenarnya sudah mengafiliasikan diri dengan DESBUMI terkait upaya pembinaan terhadap keluarga dan mantan pekerja migran, dengan didampingi Panca Karsa.

Empat tahun berselang pasca disahkannya Perdes No. 4 tahun 2015 tentang Perlindungan TKI Luar Negeri Asal Desa di Lombok Tengah setidaknya terdapat 3 perubahan yang terasa di desa. *Pertama*, menurunnya aktivitas calo dan PL di Desa. Dengan aktifnya pemerintah desa dan DESBUMI dalam melakukan sosialisasi pada

masyarakat terkait migrasi aman sesuai amanat perdes, banyak calon pekerja migran yang kini mengurus sendiri proses perizinan di level desa yang sebelumnya dilakukan oleh calo/PL. Dengan kata lain, secara individu Perdes ini membentuk kultur baru di masyarakat untuk datang ke kantor desa dan tertib administrasi. Terbiasanya masyarakat ke kantor desa dan berinteraksi dengan pemerintah desa diharapkan dapat membuka peluang keterlibatan warga dalam kegiatan-kegiatan lain di desa.

“Perubahannya yang pertama itu kan yang dari segi calonnya, yang rekrutmentnya yang dulu biasa berkeliaran dengan adanya DESBUMI ini akhirnya semua sampe kader-kader kita ini yang ada di dusun ini kita bentuk kader untuk menjangking rekrutment terutama kemudian dia melaporkan ke desa.” (H. Haris, mantan Kades, desa penelitian di Lombok Tengah, 7 Juli 2019)

Tertibnya administrasi pekerja migran, mendorong terwujudnya perubahan *kedua* di tingkat desa, yaitu kepemilikan basis data mobilitas pekerja migran di desa, yang menjadi basis dalam pengambilan keputusan strategis di desa. Data keberangkatan, penempatan, kepulangan serta pengaduan masalah pekerja migran asal Desa dikumpulkan serta difasilitasi oleh kader-kader DESBUMI dan kelompok “La Tansa” yang sering kali jemput bola hingga ke rumah-rumah warga.

Perubahan *ketiga* adalah menurunnya angka keberangkatan kembali pekerja migran. Perubahan ini didorong karena perekonomian mereka yang semakin stabil dan kesadaran akan risiko-risiko yang ditimbulkan karena bekerja ke luar negeri.

Terlepas dari keberhasilan Panca Karsa mendorong terbentuknya Perdes Perlindungan TKI asal desa penelitian, proses ini belum sepenuhnya dapat dilihat sebagai *collective action* dari perempuan desa. Kebijakan ini banyak didorong justru oleh Panca Karsa. Hanya saja Perdes ini dapat menjadi *starting point* untuk mendorong keterlibatan perempuan di desa dalam isu pekerja migran, mengingat Perdes tersebut menjamin pemerintah untuk mengadakan pemberdayaan dan pelatihan bagi organisasi dan mantan pekerja migran.

4.3. Perubahan Anggaran: Alokasi Dana Desa

Adanya Perdes No. 4 tahun 2015 ini juga memberikan kegiatan DESBUMI porsi dalam keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Dana Desa juga digunakan untuk pemberdayaan. Besaran anggaran yang diterima DESBUMI beragam setiap tahunnya, sesuai dengan pengajuan dan verifikasi yang dilakukan pemerintah desa bersama BPD (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Alokasi Dana Desa untuk kegiatan DESBUMI

Tahun	Anggaran	Alokasi	Penerima Manfaat
2016	Rp4.000.000,00	Pelatihan pembuatan kripik	Perempuan eks PMI
2017	Rp5.000.000,00	Pelatihan paralegal	Mantan PMI, Masyarakat, Kadus, keluarga PMI
2018	Rp9.000.000,00	Sosialisasi pembuatan PIRT dan pembuatan sertifikat dari Dinkes	Mantan PMI yang sudah ikut pelatihan di tahun 2016
2019	Rp12.000.000,00	Sosialisasi DESBUMI ke Perangkat Desa baru, pengadaan barang seperti etalase untuk memajang produk La Tansa dan IR	Perangkat desa, kelompok perempuan pemerhati Buruh Migran “La Tansa”

Sumber: Wawancara dengan Nada, Kader DESBUMI, 09 Juli 2019.

Pengurus DESBUMI selalu berdiskusi sebelum menentukan jumlah anggaran yang diajukan dan penggunaannya.

“Setelah keluar peraturan desa baru kita berikan anggaran untuk pembinaan jadi ekspurna yang kita bina dengan maksud supaya agak kurangi dia minat-minat balik lagi dan ternyata binaan kita ini udah berhasil mba tapi ngga tahu perjalanannya sekarang setelah kami berhenti.” (H. Haris, mantan Kades, desa penelitian di Lombok Tengah, 7 Juli 2019).

“Itukan lembaga yang dilahirkan oleh desa sehingga yang menghidupi kan desa sebenarnya. Tapi kita cuma dikasih anggaran untuk pemberdayaan saja.” (Nada, Kader DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 6 Juli 2019)

5. Strategi Perkumpulan Panca Karsa untuk Mengawal Migrasi Aman

Dalam mewujudkan perubahan-perubahan di atas, Perkumpulan Panca Karsa melakukan pendekatan *bottom-up* dari tingkat desa ke kabupaten dalam mengawal agenda migrasi aman yang mereka perjuangkan. Sebagai langkah awal, mereka melakukan survei untuk memetakan pekerja migran di desa untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan pekerja migran. Hasil pemetaan lalu mereka bawa untuk mendekati tokoh kunci di desa demi mendapatkan dukungan pembentukan kelompok DESBUMI. Keberadaan DESBUMI dan kuatnya dukungan dari pemerintah desa lalu dijadikan modal untuk mendekati pemerintah di tingkat kabupaten, termasuk dengan melakukan kegiatan dengar pendapat (*hearing*) dengan pejabat pemerintah, serta dengan aksi *longmarch* untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah daerah.

Pemetaan sosial demografi

Bukan perkara mudah bagi Panca Karsa untuk memunculkan kepedulian warga dan pemerintah desa terhadap pekerja migran, khususnya perempuan. Kerja Panca Karsa di desa penelitian diawali dengan melakukan survei terhadap 800 orang mantan pekerja migran asal desa ini. Hasil survei tersebut menunjukkan berbagai permasalahan yang dialami pekerja migran, baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang sudah banyak dijelaskan di sub-bagian sebelum ini.

“Kayak testimoni langsung kepada mereka kan. Sehingga nanti itu yang kita informasikan semua ke masyarakat, bahwa kita sudah melakukan survei di desa, dari 300 orang mantan pekerja migran, dan hasilnya itu ini. Dan hasil ini juga kita tunjukkan ke Desa. Dan untuk membuka pikiran bahwa ternyata banyak kasus yang terjadi di desa saya yang selama ini saya nggak pernah tau. Berarti memang kita butuh sesuatu untuk memberikan perlindungan kepada warga kita yang akan bekerja ke luar negeri.” (Tania, staf PPK, Lombok Tengah, 2 Juli 2019)

Membangun jaringan dengan tokoh kunci di desa

Hasil temuan survei di atas kemudian disampaikan oleh Panca Karsa ke pemerintah dan warga desa agar segera ditindaklanjuti untuk mengatasi masalah yang dialami pekerja migran asal desa ini. Sosialisasi dilakukan di kantor desa, dari dusun ke dusun, dari forum ke forum hingga *door to door* untuk memunculkan kepedulian bersama terhadap masalah pekerja migran di desa.

Hasil survei juga digunakan sebagai instrumen untuk membangun jaringan dengan pemerintah desa. Gayung bersambut, H. Haris - Kepala Desa periode 2006-2018, menerima secara terbuka hasil survei tersebut dan berkomitmen untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja migran asal desa ini. H. Haris adalah salah satu sosok kunci dalam advokasi perlindungan pekerja migran di desa ini. Kepedulian terhadap masalah pekerja migran didasari pada rasa iba atas masalah-masalah yang selama ini dialami pekerja migran yang dia lihat sehari-hari, seperti terlantar di negeri orang, mengalami kekerasan dan pengekangan. Alasan ini semakin kuat dengan temuan survei Panca Karsa yang menunjukkan bahwa pekerja migran asal desa ini mengalami banyak masalah. Melihat respon baik dari H. Haris yang memiliki kuasa dan posisi strategis di desa, Perkumpulan Panca Karsa berusaha menjalin komunikasi yang intens dengannya untuk memastikan agenda-agenda mereka dapat berjalan baik.

“Yang membuat saya tertarik ya? kasihan. Ya karena mereka ini dikirim ilegal sampe tempat tujuan terkatung-katung kalau dia mendapat musibah di sana pemerintah kadang-kadang tahu kadang-kadang ndak. Setelah bermasalah besar baru kemudian pemerintah tahu dan kadang-kadang kita nda tahu siapa yang ngirim siapa yang ya gitu-gitu lah. Kemudian ngga ada seolah-olah kurang begitu serius pemerintah karena dasarnya nda tahu di mana dia berada.” (H. Haris, mantan Kades, desa penelitian di Lombok Tengah, 7 Juli 2019)

Berawal dari dukungan penuh H. Haris ini, kader DESBUMI di desa penelitian bisa terbentuk. Para kader ini yang bekerja dari rumah ke rumah, dusun ke dusun, menyampaikan informasi mengenai migrasi aman. Mereka juga menerima pengaduan jika ada masalah menimpa pekerja migran asal desa penelitian. Namun dalam penanganannya mereka selalu bekerjasama dengan PPK untuk membantu mereka berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Membangun jaringan dengan tokoh kunci di kabupaten

Sukses di desa penelitian, PPK selanjutnya berusaha melakukan pendekatan yang sama di tingkat kabupaten. Komitmen pemerintah kabupaten untuk melindungi pekerja migran asal Lombok Tengah menjadi penting mengingat besarnya persentase pekerja migran asal Lombok Tengah. Tercatat di tahun 2017 Lombok Tengah menempati posisi kedua se-Provinsi NTB dan ke tujuh se-Indonesia sebagai kabupaten penyumbang pekerja migran terbesar.

Sempat terjadi perdebatan di internal Panca Karsa dalam memilih jalur yang digunakan untuk advokasi, antara eksekutif atau legislatif. Panca Karsa sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memperhatikan isu ini memutuskan untuk melakukan pendekatan ke pemerintah kabupaten melalui eksekutif, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Ide pembentukan Perda ini sempat ditolak kepala dinas terkait saat itu karena dianggap tidak menyelesaikan masalah pekerja migran. Tidak putus asa, ide ini kemudian dibawa ke legislatif dan Asisten 1 Sekretaris Daerah yang kemudian direspon dengan baik. Sempat dilakukan beberapa kali *hearing* (proses dengar pendapat) dan diskusi dengan beberapa anggota DPRD dari berbagai fraksi seperti PKS, PKB, Golkar, PPP dan Demokrat.

“Tetapi tiga tahun sebelum itu, kita mencoba untuk mewacanakan di tingkat pemerintah, berdiskusi dengan pemerintah, mengenai bagaimana regulasi ini sangat penting untuk strategi perlindungan terhadap pekerja migran. Itu memang prosesnya cukup panjang sampai kita bisa meyakinkan. Karena waktu itu memang terjadi perdebatan cukup panjang sebenarnya. Antara eksekutif dengan legislatif ini kan mana yang lebih strategis waktu itu, pernah eksekutif, kemudian tidak terlalu ada komitmen kita lihat kepala dinas waktu itu kan. Dinas Tenaga Kerja. Waktu itu dia bilang, regulasi kan bukan salah satu yang akan menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kita melakukan pencegahan sebagai solusi. Tetapi ya tetap kita ngotot, kalau tidak ada regulasi ya nggak mungkin lah Pemerintah Daerah akan men-support kegiatan-kegiatan untuk pencegahan itu. Nah perdebatannya di situ, sehingga kita balik arah, advokasi kita lakukan, kita kuatkan di legislatif. Akhirnya memang inisiatifnya legislatif yang membuat jalan itu lebih terang kemaren. Itu kemudian akhirnya bisa kita lahirkan peraturannya.” (Halimah, Manager Program PPK, Kantor PPK, 2 Juli 2019)

Hearing pertama Panca Karsa dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada 28 Januari 2015 menghasilkan putusan bahwa perlu diadakan riset untuk memperkuat landasan pembentukan Perda. Pada 28 Mei 2015 Panca Karsa beserta DESBUMI dan kelompok perempuan mantan pekerja migran dan perempuan keluarga pekerja migran dari 5 desa di Lombok Tengah datang dan melakukan aksi *longmarch* dengan membawa poster-spanduk yang berisi aspirasi-aspirasi ke DPRD Lombok Tengah, untuk mendesak Perda Perlindungan Pekerja Migran segera disahkan agar bisa dimasukkan dalam Prolegda 2015 dan dibiayai APBDP. Panca Karsa juga membawa draf Raperda Perlindungan Buruh Migran untuk diajukan ke DPRD dan surat perjanjian dengan legislatif yang isinya bahwa dewan berjanji memperjuangkan perda tersebut.

“Lupa temanya tapi banyak yang diusulkan dari hotel untul curi perhatian publik, rame, kita teriak-teriak juga untuk terima. Kita orasi dulu depan kantor DPR baru kita diterima untuk diskusi.” (Saripah, anggota La Tansa, desa penelitian di Lombok Tengah, 9 Juli 2019)

“Dalam proses penyusunan Perda, staf dan aktivis buruh migran di Desa terlibat dalam hearing yang dilakukan oleh DPRD. Ada sekitar 16 orang yang ikut hadir meliputi staff DESBUMI dan anggota Kelompok Pemerhati Buruh Migran.” (Tania, staf PPK, Lombok Tengah, 9 Juli 2019)

Desember 2016, dalam forum yang dihadiri wakil bupati Lombok Tengah, DPRD memutuskan membentuk Pansus yang bertugas untuk merumuskan Perda Perlindungan Pekerja Migran. Setahun berselang tepatnya pada 6 Maret 2017, pada sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah yang dihadiri 42 dari 50 anggota DPRD dibacakan Rancangan Perda Perlindungan Pekerja Migran untuk kemudian dibahas dan disetujui wakil bupati. Beberapa poin dalam Perda ini mengamanatkan adanya layanan satu pintu untuk kepengurusan dokumen pekerja migran supaya lebih efektif dan mencegah terjadinya manipulasi. Seminggu berselang, 13 Maret 2017 terbentuklah Perda Perlindungan TKI Lombok Tengah yang ditanda tangani oleh Bupati.

Perda Perlindungan TKI Lombok Tengah tersebut secara umum memandatkan perlindungan pada pekerja migran sejak pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Perda ini juga mengamanatkan pembentukan layanan terpadu yang dapat meningkatkan proses pelayanan penempatan dan perlindungan calon pekerja migran/pekerja migran yaitu Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang kemudian berubah menjadi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) mengikuti nomenklatur pusat. LTSA-P2TKI Lombok Tengah menjadi percontohan nasional karena mampu menggabungkan 7 (tujuh) instansi terkait kepengurusan dokumen pekerja migran yaitu Dinas Kesehatan, Lembaga Perbankan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan dan BP3TKI, dan Kepolisian Daerah di bawah atap yang sama.

Disahkannya Perda No. 1 tahun 2017 ini menjadi bukti konkrit komitmen Pemerintah Daerah Lombok Tengah yang didorong berbagai unsur di masyarakat seperti Panca Karsa untuk melindungi pekerja migrannya meskipun belum ada kebijakan ditingkat pusat yang dapat menjadi landasannya. Undang-Undang perlindungan pekerja migran di level nasional sendiri baru disahkan tahun 2018. Hal ini bukan perkara besar mengingat Perda dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.

Terbentuknya Perda Perlindungan TKI Lombok Tengah setelah melalui proses selama 4 tahun tidak terlepas dari campur tangan Panca Karsa dan aksi kolektif dari kelompok perempuan serta DESBUMI yang sudah terbentuk di desa. *Hearing* dan aksi yang dilakukan DESBUMI dan kelompok perempuan di hadapan DPRD menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata mereka dalam perumusan perda karena secara tidak langsung memberi tekanan pada pemerintah daerah.

6. Situasi Yang Mendorong dan Menghambat Perubahan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat perlindungan pekerja migran baik di level desa maupun kabupaten. Pola pikir masyarakat yang masih cenderung memilih jalur cepat, walau ilegal, terkait keberangkatan kerja, dapat membuat Perda maupun Perdes tidak berjalan efektif. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh alur birokrasi yang panjang dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai risiko menjadi buruh migran ilegal. Kurangnya kesadaran ini disebabkan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, baik pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, untuk melakukan penyebaran informasi mengenai buruh migran di masyarakat. Keberadaan DESBUMI di desa sebenarnya menambah sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi. Hanya saja, permasalahan anggaran tidak serta merta terpecahkan.

“Hambatannya ya [pola pikir] itu. Jadi susah sekali untuk memikirkan mereka. Karena begitu orang berhasil, seolah-olah dia sudah sampai sana tanpa memikirkan kendala-kendala yang akan terjadi di perjalanan. Karena

rata-rata mereka kan dari desa yang sangat terpencil, ke Mataram saja mungkin jarang. Tiba-tiba harus terbang melewati berbagai negara. Tetapi tadi itu adalah dorongan ya, ada persoalan ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi itu dia lebih percaya PL [calo migran] dari pada kita. Karena PL ini seribu langkah jurus untuk meyakinkan mereka dengan iming-iming dan lain sebagainya. Baru kita kan, kita kan juga tidak setiap saatlah bisa pasang badan dengan mereka.” (Halimah, Program Manager PPK, Lombok Tengah, 2 Juli 2019)

“Kalau idealnya itu kan misalnya bahwa ketika kita bekerja ke luar negeri, misalnya saya jadi calon pekerja migran nih, saya harusnya kan tau dong semua informasi tentang proses, mekanisme, serta dokumen apa saja yang akan saya butuhkan ketika bekerja ke luar negeri. Dan itu sebetulnya tugas dari pemerintah yang memberikan sosialisasi. Nah karena ketidakadaan anggaran ini, sehingga sosialisasi itu tidak sampai ke desa.” (Tania, staf PPK, Lombok Tengah, 2 Juli 2019)

Adanya alokasi Dana Desa untuk kegiatan DESBUMI berkontribusi terhadap keberlanjutan pemberdayaan perempuan di desa, kegiatan internal kelompok, dan juga membantu regenerasi struktur kelompok. Sejak tahun 2016, sudah dianggarkan untuk kegiatan DESBUMI terkait peningkatan kapasitas. RPMJDes tahun 2016 sudah juga sudah menganggarkan kegiatan pemberdayaan perempuan. Di tahun 2020, sudah dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan kelembagaan DESBUMI, namun karena pandemi COVID-19 yang merebak, pendanaan untuk kelembagaan dialihkan untuk penanganan pandemi.

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan DESBUMI sempat memunculkan perdebatan di internal desa yang lalu menghambat sosialisasi kegiatan. Besarnya anggaran desa yang diberikan ke DESBUMI pernah menimbulkan kecemburuan sosial antar lembaga desa. Pada dasarnya besaran anggaran untuk lembaga desa sesuai dengan pengajuan lembaga desa yang kemudian diverifikasi oleh BPD dan kepala desa. Hanya saja memang pada masa kepemimpinan H. Haris, DESBUMI seolah menjadi anak emas hingga menimbulkan kecemburuan dari lembaga desa lainnya. H. Haris sebagai kepala desa saat itu berdalih bahwa DESBUMI memberi dampak positif bagi desa sehingga perlu mendapat dukungan baik finansial maupun moral. Namun, perlakuan berbeda ini tidak mengganggu kerja-kerja DESBUMI. Sempat ada rumor bahwa Sekretaris BPD tidak setuju dengan anggaran yang diajukan DESBUMI pada tahun 2018, akan tetapi pada akhirnya keputusan akhir BPD menyetujui anggaran sesuai pengajuan.

“Kemarin kita lewat Pak Sekdes saja enak ngomongnya sama dia. Soalnya kan kalau lewat BPD atau apa, kemarin kan ada sekretaris BPD memang pas pembahasan sidang RPJMDes di tingkat BPD bersitegang dengan DESBUMI. Ada pak siapa namanya. Tapi kan karena dari pendamping desa itu dibilang, untung desa penelitian kan cuma ada satu desa yang ada DESBUMI di [kecamatan ini]. Akhirnya dipertahankan.” (Nada, kader DESBUMI, penginapan peneliti, 6 Juli 2019)

“Termasuk juga sebenarnya terjadi perdebatan juga di antara mereka, misalnya sama BPD. BPD ini juga kemaren sebenarnya dalam proses-proses mendorong lahirnya Perdes itu, itu dilibatkan terus sama desa. Nah tapi tidak tau kenapa, mungkin ada kecemburuan sosial.” (Tania, staf PPK, Kantor Desa, 2 Juli 2019)

Eksistensi DESBUMI diuji ketika pergantian rezim pemerintahan di desa sebagai hasil pemilihan kepala desa di tahun 2018. Keberadaan DESBUMI di desa memang mendapat dukungan dari pemerintah desa sebelumnya, namun dukungan ini rentan berubah sesuai pergantian pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa dan hampir 90% perangkatnya saat ini merupakan orang baru yang tidak pernah terlibat secara langsung dengan program-program DESBUMI. Walaupun mereka tidak secara langsung menolak keberadaan DESBUMI maupun kegiatan-kegiatan perlindungan pekerja migran, pergantian kepemimpinan menimbulkan kekhawatiran untuk keberlanjutan DESBUMI di desa.

“Kalau Pak Kades yang baru memang dia kan belum terlalu paham gimana. Jadi pelan-pelan saja kita sosialisasi ke dia gimana proses, program DESBUMI kan yang sudah berjalan beberapa tahun. Kita buat laporan, kaya gini.” (Nada, kader DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 6 Juli 2019)

“Karena kan kebanyakan perangkat baru jadi dia belum tahu program program DESBUMI. Jadi rencananya Mba Maya sama kader-kader yang lain kita akan adakan sosialisasi tentang program DESBUMI ke Kadus-Kadus baru.” (Nada, kader DESBUMI, desa penelitian di Lombok Tengah, 6 Juli 2019)

Dukungan elit desa untuk keberlanjutan program DESBUMI dan perlindungan pekerja migran di desa sangatlah sentral. Keberadaan sekretaris desa yang merupakan perangkat desa sejak lama dan turut terlibat dalam proses penyusunan perdes perlindungan pekerja migran di desa, kini menjadi kunci bagi DESBUMI untuk menjaga relasi dengan pemerintah desa.

“Ya. Awalnya sih memang, namanya dia belum mengenal kita. Kemudian diskusi-diskusi yang kita bangun, karena kan namanya berproses juga beliau kan. Nah kemaren, karena dia kan juga bawa banyak calon staf baru kan. Sehingga staf kita yang lama juga kayak Yana tadi itu kan keluar, digantikan dengan yang baru di situ.” (Halimah, Program Manager PPK, Lombok Tengah, 02 Juli 2019)

Kondisi para elit desa yang mau belajar dan bekerjasama untuk mendukung kegiatan DESBUMI menjadi salah satu faktor pendorong terus berlanjutnya program DESBUMI. Staf PPK pada pertemuan pasca penelitian bulan Oktober di Jakarta menyampaikan bahwa Kades dan para aparat desa penelitian sudah mendukung kegiatan DESBUMI dan mulai paham mengenai kerja-kerja DESBUMI serta manfaatnya buat desa. Kondisi yang demikian berbeda dengan saat dilakukan penelitian di mana Pak Kades masih berusaha memahami apa itu DESBUMI dengan kerja-kerjanya. Bentuk dukungan ini diwujudkan dengan memberikan ruang khusus buat pelayanan DESBUMI.

7. Langkah Selanjutnya

Secara garis besar baik Perdes maupun Perda perlindungan tenaga kerja ini membawa perubahan pada penanganan permasalahan calon pekerja migran dan pekerja migran baik di level desa maupun kabupaten. Praktik percaloan dan pemalsuan dokumen berusaha diatasi dengan melibatkan langsung pekerja migran dalam proses pengurusan dan sosialisasi rutin. Rantai birokrasi pengurusan dokumen yang panjang disiasati dengan membentuk LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) di kabupaten yang mengumpulkan instansi-instansi terkait di satu tempat. Lembaga khusus yang mengurus pekerja migran, DESBUMI juga berhasil direplikasi di lima desa lainnya di Lombok Tengah untuk melaksanakan fungsi administrasi seperti pendataan dan fungsi pembinaan pada calon, mantan serta keluarga pekerja migran yang selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah desa. Oleh karenanya pencapaian yang progresif ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain.

Salah satu cara mendorong replikasi adalah dengan mengadvokasi SK Bupati yang menginstruksikan desa untuk membentuk Perdes perlindungan pekerja migran sebagai mandat dari Perda Lombok Tengah No. 1 tahun 2017 tentang Perlindungan TKI Lombok Tengah. Sementara itu bagi lima desa yang sudah memiliki Perdes dan DESBUMI, pengembangan dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas orang-orang yang terlibat di dalamnya melalui berbagai pelatihan dan apresiasi. Membumikan Perdes dan DESBUMI juga menjadi penting dilakukan di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, bukan hanya di daerah-daerah kantong atau kelompok yang berafiliasi dengan pekerja migran saja. PPK berencana, tahap selanjutnya yang perlu dikerjakan untuk menjaga praktik baik adalah pelibatan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi terkait migrasi aman.

“Kita berharap semua orang menyuarakan tentang perlindungan pekerja migran. Termasuk juga organisasi masyarakat yang lain. Strateginya adalah, bagaimana misalnya pintu-pintu para tokoh agama ini sebenarnya

cukup banyak, termasuk yang di Lombok lewat tokoh agama Islam misalnya, ada khutbah Jum'at, ada pengajian-pengajian yang setiap saat dibuka, dan pesertanya itu kan golongan menengah ke bawah, yang bila Tuan Guru menyebut A, itu menjadi sakral. Ini yang kita harapkan lewat media khutbah itu bisa dibuatkan khutbah yang perspektif buruh migran. Atau di organisasi masyarakat seperti Karang Taruna, dll juga berbicara yang sama, itu yang kita harapkan, tetapi ada wujudnya. Kalau yang kemaren-kemaren kan kita hanya ajak mereka diskusi, tetapi tidak ada bentuk komitmen yang lebih terarah.” (Halimah, Program Manager PPK, Lombok Tengah, 2 Juli 2019)

Penutup

Studi kasus yang sudah diuraikan ini menunjukkan upaya advokasi perlindungan pekerja migran di desa lokasi penelitian yang dimotori oleh kelompok perempuan akar rumput, yaitu Kader DESBUMI dan anggota Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa”, dengan didukung oleh Migrant CARE dan mitra lokalnya Perkumpulan Panca Karsa. Kegiatan DESBUMI dan “La Tansa” membuka ruang bagi perempuan di desa untuk memperkuat ekonomi mereka serta meningkatkan kesadaran kritis mengenai hak-hak perempuan dan relasi yang setara dalam berumah tangga. Selain itu, perempuan desa mempunyai kesempatan untuk membangun jaringan dukungan dari sesama perempuan desa, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam mengadvokasi perlindungan pekerja migran.

Proses advokasi yang dilakukan oleh DESBUMI dan “La Tansa”, serta jaringan yang terbangun di desa dan di kabupaten, telah membuahkan hasil diterbitkannya peraturan di tingkat desa (Perdes) dan di tingkat kabupaten (Perda) terkait praktik migrasi aman. Perdes No. 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan TKI Luar Negeri adalah salah satu batu pijakan penting dalam upaya advokasi di desa ini, karena Perdes ini memberi basis legitimasi dan penganggaran Dana Desa bagi DESBUMI dan juga Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa” untuk melakukan kegiatan di desa, tidak hanya kegiatan ekonomi, tapi juga untuk mensosialisasikan prosedur migrasi kerja yang aman. Lebih jauh, advokasi di tingkat desa juga diperkuat dengan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lombok Tengah, yang memandatkan perlindungan pekerja migran melalui pembentukan layanan terpadu untuk kepengurusan dokumen pekerja migran yang legal.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana advokasi perlindungan pekerja migran merupakan upaya yang komprehensif, tidak hanya sebatas sosialisasi mengenai prosedur keberangkatan yang aman bagi PMI yang akan berangkat, pemberian layanan administrasi, namun juga memerlukan perubahan norma sosial yang memungkinkan terbuka ruang gerak perempuan di depan publik, peningkatan pengetahuan dan kesadaran perempuan, serta pemberdayaan ekonomi bagi para perempuan mantan PMI. Tidak hanya bermanfaat bagi PMI, program yang dijalankan juga bermanfaat bagi pemerintah desa, berupa pendataan mobilitas penduduk di desa yang memungkinkan pemerintah desa untuk memonitor keberangkatan dan kepulangan pekerja migran di desa. Hadirnya kelompok pemerhati pekerja migran “La Tansa” sebagai wadah bagi para eks-PMI juga berkontribusi penting dalam peningkatan kapasitas ekonomi perempuan eks pekerja migran di desa penelitian. Keterampilan yang mereka dapatkan melalui kegiatan pelatihan memberi alternatif kegiatan ekonomi bagi para eks pekerja migran sehingga mereka tidak tertarik kembali untuk menjadi PMI. Dengan demikian, upaya yang komprehensif ini memungkinkan terwujudnya perlindungan pekerja migran dan praktik migrasi yang aman.

Bibliografi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2018. Kecamatan Praya Barat Daya dalam Angka 2018.
BNP2TKI, 2019. BP3TKI Mataram Telah Marampungkan Kegiatan Sosialisasi di Tahun Anggaran 2019, diakses 16 Agustus 2019: <<http://www.bnp2tki.go.id/index.php/berita-detail/bp3tki-mataram-telah-merampungkan-kegiatan-sosialisasi-di-tahun-anggaran-2019>>.

- Migrant CARE, 2016. DESBUMI: Desa Peduli Buruh Migran, diakses 29 Januari 2020:<<http://www.migrantcare.net/DESBUMI/>>.
- Ni'mah, Z., 2017. Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok dalam *As Syir'ah Jurnal ilmu Syariah dan Hukum*, vol 51, no 2, Desember, hlm.307-344.
- Platt, M., 2017. *Marriage, Gender and Islam in Indonesia: Women Negotiating in Informal Marriage, Divorce and Desire*. London and New York: Routledge, 2017.



Minerva Access is the Institutional Repository of The University of Melbourne

Author/s:

Rahayu, M.; Abheseka, N.M.R.

Title:

Advokasi Perempuan Desa dalam Memperkuat Perlindungan bagi Pekerja Migran: Bermigrasi Aman Berkat Perdes dan Perda Perlindungan TKI = Village Women's Advocacy for Strengthening Migrant Worker Protection: Safe Migration under Village and District Regulations

Date:

2020

Citation:

Rahayu, M. & Abheseka, N.M.R. (2020). Advokasi Perempuan Desa dalam Memperkuat Perlindungan bagi Pekerja Migran: Bermigrasi Aman Berkat Perdes dan Perda Perlindungan TKI = Village Women's Advocacy for Strengthening Migrant Worker Protection: Safe Migration under Village and District Regulations. In Savirani, A. & Diprose, R. & Hartoto, A.S. & Setiawan, K.M.P. (Eds.), *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-Undang Desa* (pp. 165-188). University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU.

Persistent Link:

<http://hdl.handle.net/11343/268257>